

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Krisis moneter Indonesia pada 1997-1998 menyebabkan kontraksi besar dalam pertumbuhan ekonomi. Hill (1999) dalam Aji et al.,(2024) mencatat bahwa "Indonesia mengalami penurunan PDB yang signifikan, dengan ekonomi menyusut lebih dari 13% pada tahun 1998. Pendapatan perkapita juga mengalami penurunan signifikan, turun di bawah 500 USD setelah sebelumnya berada di atas 1000 USD mengakibatkan perekonomian di Indonesia menurun, ratusan perusahaan, sektor perdagangan serta jasa mengalami stagnan dan bertumbangan, dan terdapat 70% lebih perusahaan yang mendadak berstatus *insolvent* (Prihawantoro et al., 2002). Menurut Tambunan, (2012) Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) mampu bertahan akibat terjadinya krisis ekonomi global yang terjadi pada 1997/1998.

UMKM menjadi pilar terpenting perekonomian Indonesia. Pemberdayaan UMKM menjadi prioritas nasional sebagai agen pertumbuhan ekonomi nasional. Berdasarkan informasi dari website Kementerian Keuangan Republik Indonesia (<https://djpb.kemenkeu.go.id>) pada Tahun 2023 salah satu program pemulihan ekonomi untuk UMKM adalah pemberian Insentif bagi pelaku UMKM diberikan melalui berbagai kebijakan, seperti subsidi bunga pinjaman, restrukturisasi kredit, jaminan modal kerja, dan insentif perpajakan. Subsidi bunga bertujuan untuk memperkuat modal UMKM melalui program-program seperti Kredit Usaha Rakyat

(KUR), Pembiayaan Ultra Mikro (UMi), dan penyaluran dana bergulir yang dikelola oleh Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Kementerian KUKM.

Tabel 1.1 Data UMKM Tahun 2018-2023

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah UMKM (Juta)	64,19	65,47	64	65,46	65	66
Pertumbuhan (%)		1,98%	-2,24%	2,28%	-0.70%	1,52%

Sumber : Website Kadin Indonesia tahun 2023

Berdasarkan Tabel 1.1 Jumlah UMKM mengalami Fluktuasi dari Tahun 2018 hingga 2023. Menurut laporan dari Kadin mencatat bahwa UMKM menyumbang 61% terhadap PDB Indonesia, setara dengan Rp9.580 triliun, serta mempekerjakan sekitar 117 juta orang, yaitu 97% dari seluruh tenaga kerja pada tahun 2023. Hal ini menjadikan peran UMKM sangat besar dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Besarnya kontribusi UMKM di Indonesia menunjukkan pentingnya peran UMKM bagi perekonomian Indonesia. Melihat besarnya peran UMKM dalam perekonomian Indonesia, UMKM tentu terdapat permasalahan yang di hadapi pelaku UMKM dalam mengembangkan bisnisnya.

Tabel 1.2 Kontribusi UMKM pada PDB Indonesia

Tahun	Kontribusi UMKM Dalam PDB Indonesia (Persen)
2015	57,84
2016	60,34
2017	60,90
2018	61,00
2019	60,51
2020	60,16
2021	60,50
2022	61,07
2023	61,1

Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2023

Melalui data yang disajikan dalam Tabel 1.2 dapat disimpulkan bahwa kontribusi UMKM terhadap PDB Indonesia memperlihatkan tren yang relatif stabil dengan sedikit fluktuasi selama periode 2015 hingga 2023. Terdapat peningkatan signifikan dari tahun 2015 (57,84%) ke tahun 2016 (60,34%), menunjukkan bahwa UMKM mulai memberikan kontribusi signifikan terhadap ekonomi nasional. Setelah mencapai puncaknya pada tahun 2018 (61,00%), kontribusi UMKM cenderung stabil di kisaran 60% hingga 61%. Hal ini mengarah bahwa UMKM tetap menjadi pilar penting dalam ekonomi Indonesia meskipun ada beberapa penurunan kecil pada tahun-tahun tertentu, seperti tahun 2019 dan 2020. Dari tahun 2021 hingga 2023, terjadi sedikit peningkatan yang konsisten, dan mencerminkan pemulihan dan pertumbuhan UMKM pasca-pandemi serta peran penting dalam mendukung ekonomi lokal.

Menurut Mainake, (2022) melalui data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM), salah satu kebutuhan utama UMKM adalah akses terhadap kredit untuk memenuhi kebutuhan permodalan. Namun, meskipun UMKM memiliki kontribusi yang signifikan, penyaluran kredit kepada sektor ini masih tergolong rendah, yakni hanya sekitar 20%. Hal ini belum mencapai target Bank Indonesia yang diharapkan, Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) mencapai 30% pada Tahun 2024. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 23/13/PBI/2021 mengenai RPIM yang berlaku untuk Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah. UMKM sangat membutuhkan akses kredit perbankan untuk

memenuhi kebutuhan permodalan, mengingat peran penting UMKM dalam mendukung pertumbuhan ekonomi negara.

Presiden RI Joko Widodo meminta industri jasa keuangan turut mendukung pertumbuhan sektor UMKM melalui penyaluran kredit. Hal ini mengingat porsi pembiayaan UMKM masih belum optimal sehingga dibutuhkan inovasi dan komitmen dari industri jasa keuangan. Hal ini disampaikan Presiden di Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) 2024 yang dikutip oleh media online Kompas :

“Kredit perbankan untuk UMKM saat ini masih di angka 19 persen. Ini perlu sebuah terobosan, perlu sebuah strategi agar ada peningkatan kredit perbankan terhadap UMKM, sehingga kita bisa melihat UMKM kita tumbuh dengan baik,”

(<https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2024/02/20/presiden-minta-bank-tingkatkan-kredit-umkm> Diakses pada 22 September 2024)

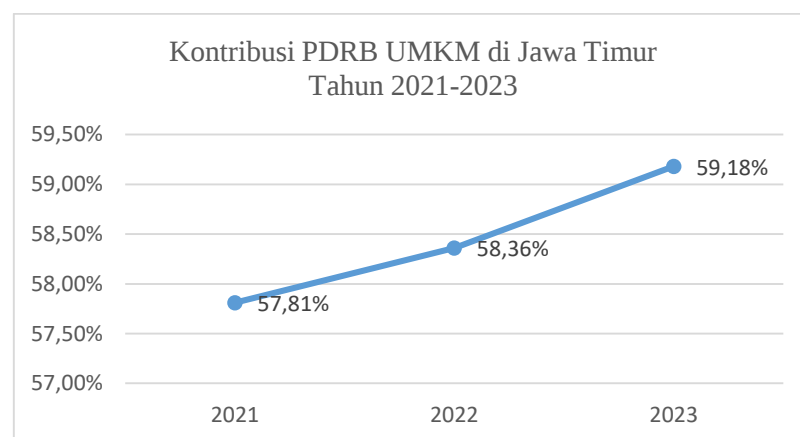
Peran UMKM di Jawa Timur juga tidak kalah pentingnya terhadap ekonomi Daerah. Dengan beragam jenis usaha, mulai dari kerajinan tangan, kuliner, hingga produk fashion, UMKM ini mencerminkan kekayaan budaya dan kreativitas masyarakat setempat. Semangat kewirausahaan yang tinggi di kalangan masyarakat Jawa Timur, ditunjang oleh komunitas yang saling mendukung, menciptakan ekosistem yang kondusif bagi perkembangan UMKM. Menurut Anugerah & Nuraini, (2021). Jawa Timur menjadi kawasan yang strategis yakni berada di tengah Indonesia, hal tersebut menunjukkan potensi untuk dapat mengembangkan usaha atau industri. Banyaknya usaha-usaha yang tersebar di Jawa Timur salah satunya yakni UMKM menyebabkan pusat perekonomian terpusar di Jawa termasuk pula di Jawa Timur. Berikut adalah data UMKM di Jawa Timur.

Tabel 1.3 Data UMKM di Kab/Kota Jawa Timur

NO	Kabupaten/Kota	Skala Usaha			
		Mikro	Kecil	Menengah	Jumlah
1	KAB. PACITAN	32.316	5	7	32.328
2	KAB. PONOROGO	21.505	21	6	21.532
3	KAB. TRENGGALEK	23.282	1	0	23.283
4	KAB. TULUNGAGUNG	24.352	4	1	24.357
5	KAB. BLITAR	34.677	15	2	34.694
6	KAB. KEDIRI	29.495	18	5	29.518
7	KAB. MALANG	99.330	33	8	99.371
8	KAB. LUMAJANG	39.868	19	1	39.888
9	KAB. JEMBER	76.482	31	7	76.520
10	KAB. BANYUWANGI	37.898	16	2	37.916
11	KAB. BONDOWOSO	39.877	5	6	39.888
12	KAB. SITUBONDO	26.423	11	3	26.437
13	KAB. PROBOLINGGO	82.199	67	34	82.300
14	KAB. PASURUAN	27.665	8	0	27.673
15	KAB. SIDOARJO	43.661	34	5	43.700
16	KAB. MOJOKERTO	34.978	21	3	35.002
17	KAB. JOMBANG	46.510	18	6	46.534
18	KAB. NGANJUK	30.228	23	2	30.253
19	KAB. MADIUN	29.290	60	4	29.354
20	KAB. MAGEATAN	48.783	14	4	48.801
21	KAB. NGAWI	50.541	4	2	50.547
22	KAB. BOJONEGORO	22.713	9	4	22.726
23	KAB. TUBAN	52.543	6	1	52.550
24	KAB. LAMONGAN	71.278	8	2	71.288
25	KAB. GRESIK	18.890	2	2	18.894
26	KAB. BANGKALAN	81.891	291	70	82.252
27	KAB. SAMPANG	83.327	306	41	83.674
28	KAB. PAMEKASAN	49.228	49	21	49.298
29	KAB. SUMENEP	11.891	16	7	11.914
30	KOTA KEDIRI	38.583	541	65	39.189
31	KOTA BLITAR	21.779	275	40	22.094
32	KOTA MALANG	18.120	22	31	18.173
33	KOTA PROBOLINGGO	28.967	330	32	29.329
34	KOTA PASURUAN	26.928	201	18	27.147
35	KOTA MOJOKERTO	18.801	262	50	19.113
36	KOTA MADIUN	32.546	388	42	32.976
37	KOTA SURABAYA	48.337	14	9	48.360
38	KOTA BATU	32.345	321	27	32.693
	TOTAL	1.537.527	3469	570	1.541.566

Sumber : Diskop UKM Jatim, Data Diolah Penulis 2024

Melalui tabel diatas dapat diketahui bahwa usaha mikro mendominasi dengan jumlah terbanyak, yaitu 1.537.527 unit. Ini menunjukkan bahwa sektor mikro menjadi pilar utama dalam struktur ekonomi UMKM di Jawa Timur. Menurut Diskop UKM Jatim, (2023) Kontribusi UMKM pada Tahun 2023 dalam PDRB Jawa Timur cukup fantastis sebesar Rp 2.953,55 triliun. Pertumbuhan positif UMKM Jawa Timur terlihat melalui besarnya kontribusi nilai tambah bruto terhadap PDRB Provinsi. Berdasarkan informasi melalui Website Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Diskominfo) Jawa Timur memberikan kontribusi terhadap perekonomian Pulau Jawa sebesar 25,07 persen dengan angka pertumbuhan sebesar 4,81 persen.

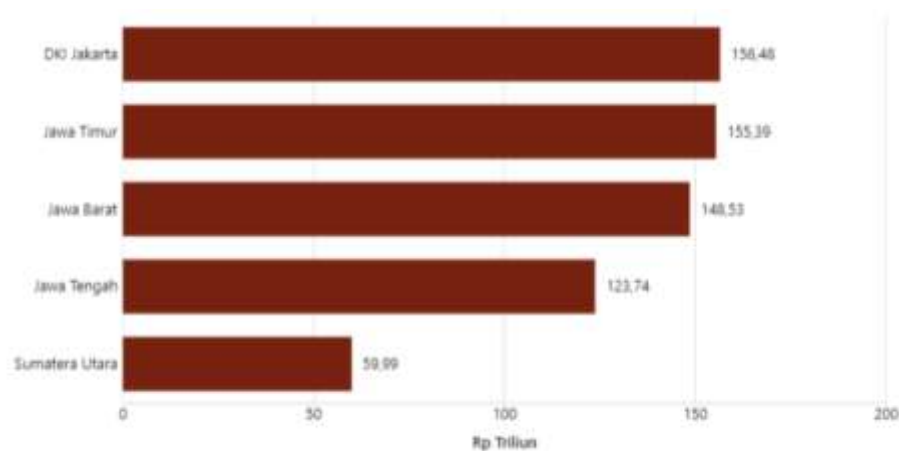


Gambar 1. 1 Kontribusi UMKM dalam PDRB Jawa Timur Tahun 2021-2023

Sumber : Data Diolah Penulis (2024)

Merujuk pada grafik diatas perkembangan UMKM di Jawa Timur memperlihatkan perkembangan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Kontribusi UMKM terhadap PDRB Jawa Timur menunjukkan tren kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2022, terjadi peningkatan sebesar 0,55 persen dibandingkan dengan capaian tahun 2021. dan kemudian meningkat pada Tahun 2023 mencapai

59,18%. Dukungan ini tak lepas dari peran pemerintah daerah melalui berbagai program pelatihan, akses permodalan, dan pemasaran telah mendorong inovasi dan daya saing UMKM lokal. UMKM Jawa Timur merupakan sektor yang paling dominan. untuk itu, pemerintah daerah dan pemerintah pusat terus mengupayakan untuk memberikan yang terbaik supaya industri UMKM dapat terus tumbuh setiap tahunnya. (Nasrida et al., 2023).



Gambar 1.2 Wilayah Terbanyak Penyaluran Kredit UMKM

Sumber : Katadata media network tahun 2021

Berdasarkan data di atas Provinsi Jawa Timur menjadi wilayah terbanyak kedua dengan peyaluran kredit UMKM oleh perbankan. Data Bank Indonesia menyebutkan kelima provinsi tersebut mencatatkan nilai kredit UMKM yang melampaui rata-rata nasional, yakni sebesar Rp32,28 triliun. Perhatian pemerintah terhadap masalah permodalan UMKM ditunjukkan dengan dibuatnya kebijakan melalui peraturan Bank Indonesia No.14/22/PBI/2012 yakni pemberian kredit pembiayaan sebagai alternatif sumber pembiayaan untuk UMKM.

Keterbatasan modal menjadi penghambat dan mempersempit ruang gerak UMKM karena tidak dapat mengembangkan usahanya. (Pratiwi et al., 2024).

Temuan Utomo et al., (2024) menandakan bahwa adanya program bantuan permodalan memainkan peran penting dalam meningkatkan pertumbuhan UMKM dengan menyediakan akses ke sumber daya keuangan untuk investasi, ekspansi, dan modal kerja. Akses ke keuangan sering disebut sebagai kendala utama bagi UMKM, terutama di negara berkembang. Untuk itu inovasi yang bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap permodalan serta layanan keuangan mampu menyumbangkan hal yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan UMKM serta pembangunan ekonomi (Utomo et al., 2024)

Permasalahan berikutnya yang terkait dengan akses permodalan adalah kendala yang terus-menerus dihadapi oleh UMKM. (Haryanti, 2024). Perkembangan pelaku UMKM di Indonesia terhambat karena terbatasnya akses terhadap pembiayaan. (Sholikin, 2024). Dari sisi UMKM, pengelolaan administratif masih belum dilakukan secara profesional, dan banyak pelaku UMKM yang belum dapat melengkapi dokumen legalitas atau administrasi, termasuk laporan atau catatan keuangan. Kemudian pemahaman UMKM mengenai produk atau layanan keuangan khususnya terkait permodalan juga masih terbatas (Santoso, 2022).

UMKM masih menghadapi berbagai tantangan dalam mengembangkan usaha dan mengakses pembiayaan. Beberapa kendala menyebabkan tingkat akses UMKM terhadap pembiayaan tetap rendah, baik dari sisi UMKM maupun lembaga keuangan. Dilihat dari perspektif UMKM, pengelolaan administratif masih belum dilakukan secara profesional, dan banyak pelaku UMKM yang belum dapat melengkapi dokumen legalitas atau administrasi, termasuk laporan atau catatan keuangan. Untuk itu sangat diperlukan pemahaman bagi pelaku UMKM tentang

pentingnya pembuatan laporan keuangan supaya dapat mengakses program pembiayaan. Hal ini pula yang disampaikan oleh Arief kepala bidang pembiayaan Diskop UKM Jatim yang dikutip pada situs online Diskop UKM Jatim sebagai berikut :

“Pembukuan yang tepat akan membantu pelaku UMKM dalam mengakses berbagai program pembiayaan dari pemerintah, seperti Prokesra dan New Dana Bergulir, yang telah disediakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur”

(<https://diskopukm.jatimprov.go.id/berita/melalui-talkshow-pembiayaan-diskop-ukm-jatim-tekanan-pentingnya-pembukuan-kepada-para-pelaku-kukmi>. Diakses pada 21 September 2024)

Permodalan masih menjadi tantangan utama bagi UMKM, disebabkan oleh keterbatasan dalam menjalin kemitraan dan kurangnya pemahaman tentang cara memperoleh modal. Selain itu, banyak UMKM yang menghadapi kesulitan dalam memenuhi persyaratan untuk memperoleh modal dari bank dan lembaga keuangan, serta kesulitan dalam menyediakan jaminan untuk kredit modal. Beberapa pelaku UMKM juga mengeluhkan tingkat bunga pinjaman yang terlalu tinggi. Menurut Hartono & Hartomo, (2016) UMKM masih menghadapi permasalahan krusial terkait permodalan, termasuk modal kerja maupun modal investasi. Hal tersebut disebabkan karena sulitnya persyaratan pengajuan kredit sehingga tidak memenuhi ketentuan layak untuk memperoleh kredit perbankan. Laporan Perhitungan Nilai Tambah Bruto Diskop UKM Jatim tahun 2022 menyajikan data bahwa kesulitan UMKM Masalah yang paling menonjol adalah pemodalan, dengan persentase mencapai 26,4%.



Gambar 1.3 Permasalahan Utama UMKM di Jawa Timur

Sumber : Laporan Perhitungan Nilai Tambah Bruto Diskop UKM Jatim tahun 2022

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa jumlah UMKM yang menghadapi kesulitan dalam permodalan paling tinggi dengan presentase sebesar 26,4%. Suku bunga kredit dalam program Prokesra yang semula mencapai 12,25% kini hanya dikenakan sebesar 3%, setelah Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) memberikan subsidi selisih bunga sebesar 9,25% melalui Dinas Koperasi dan UKM. Program ini dijalankan dengan kerja sama Bank UMKM Jawa Timur atau dikenal dengan BPR Jatim sebagai penyalur kredit.

Prokesra akan terus diperkuat, Program yang dirancang oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, ini bertujuan untuk mempermudah pelaku usaha mikro dalam memperoleh kredit dengan bunga rendah. Prokesra dinilai efektif dalam mendukung program pokok daerah dan akan difokuskan pada kelompok-kelompok ekonomi, seperti BUMDES, peternak, nelayan, serta sektor lainnya. Prokesra dirilis pada Desember tahun 2022, mulanya program ini, plafon kredit maksimal Rp10 juta, dengan kurun waktu 1 tahun. Pada tahun 2023, plafon

kredit dinaikkan menjadi Rp50juta dalam kurun waktu menjadi 3 tahun dengan bunga tetap dan subsidi tetap. Skema tersebut berubah karena adanya tuntutan dari pelaku usaha, seperti yang dilansir pada portal Diskop UKM Jatim :

“karena tuntutan pelaku usaha maka pada Tahun 2023 ini ada perubahan desain program, plafon maksimal yang awalnya Rp. 10 juta maka pada tahun ini dinaikkan menjadi Rp. 50 juta dengan kurun waktu yang awalnya 1 tahun menjadi 3 tahun dengan bunga tetap 3 persen dan subsidi juga tetap di 9,25 persen”

(<https://diskopukm.jatimprov.go.id/berita/prokesra-berikan-kemudahan-akses-permodalan-bagi-pelaku-umkm>, Diakses pada 22 September 2024)

Prokesra menjadi program yang berkolaborasi dengan PT Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur (BPR Jatim). Program ini memiliki tingkat kredit macet (NPL) hanya 0,26%. Kesepakatan ini dilakukan dalam rangka mendukung transformasi ekonomi di Jawa Timur. Kegiatan ini juga sebagai pemberdayaan UMKM melalui ikatan kerja sama, akses izin yang mudah, penguatan kelembagaan, dan interaksi antar aktor yang bertujuan untuk mengembangkan UMKM supaya dapat ertransformasi menjadi bisnis yang kuat dan berdaya, sehingga dapat berkontribusi pada peluang kerja baru, keadilan ekonomi, peningkatan performa perekonomian, dan pengurangan kemiskinan. Realisasi kredit Prokesra Tahun 2022 Sebesar Rp. 15.197.900.000, Dari Target Rp. 80 Milyar Atau 18,99 % Kepada 1.792 UMKM. Pada desember 2023 terdapat 11.889 UMKM atau sebesar 86,52 % UMKM dari target 13.741 UMKM. Tahun 2024 telah tersalur kepada 5.131 UMKM. Angka ini turun jauh dari tahun sebelumnya. Hal ini di sampaikan oleh Deby Rositasari selaku Staff bidang Pembiayaan Diskop UKM Jatim, dalam observasi awal:

“Angka ini jauh berbeda dengan realiasasi pada Tahun 2023, hal ini memang sangat terlihat ketika terjadi perbedaan limit pada plafonnya, yang mana Tahun 2023 palfon prokesra mencapai 50jt dan Tahun 2024 turun menjadi 25jt”

(Hasil wawancara 13 Maret 2025)

Implementasi Prokesra di Jawa Timur dapat dilihat melalui data jumlah peminjam di beberapa kabupaten/kota. Lumajang tercatat sebagai daerah dengan jumlah peminjam terbanyak, yaitu 344 orang, diikuti oleh Kediri dengan 340 peminjam dan Tulungagung dengan 320 peminjam. Sementara itu, Sidoarjo, pada posisi ke-14 yakni 137 peminjam, angka ini turun banyak dari Tahun sebelumnya dengan total peminjam sebanyak 451 peminjam Meskipun Sidoarjo merupakan kabupaten yang relatif maju, memiliki jumlah peminjam yang lebih rendah dibandingkan kabupaten-kabupaten lainnya, berikut adalah tabel jumlah peminjam prokesra Tahun 2024 :

Tabel 1.4 Data Penyaluran Prokesra Tahun 2024

No	Kab.Kota	Jumlah UMKM
1	Lumajang	344
2	Kediri	340
3	Tulungagung	320
4	Magetan	297
5	Ponorogo	261
6	Ngawi	246
7	Tuban	253
8	Jombang	244
9	Lamongan	232
10	Banyuwangi	185
11	Trenggalek	174
12	Bondowoso	166
13	Blitar	150
14	Sidoarjo	137

Sumber : Diskop UKM Jatim (2025)

Pada pelaksanaannya, Prokesra mengalami beberapa permasalahan. Diskop UKM Jatim menetapkan penerima subsidi bunga merupakan pelaku UMKM di Jawa Timur sebagai penerima manfaat, pada realitanya terdapat ketidaktepatan sasaran pada programnya. Pada saat rapat evaluasi kegiatan Prokesra dilakukan pada tahun 2023 ada salah satu undangan yang menyampaikan bahwa pelaku

UMKM tidak menggunakan kreditnya untuk pengembangan usaha namun digunakan untuk membeli motor untuk anaknya. Pada hal yang sama dirasakan oleh Diskop UKM Jatim itu sendiri karena para program di rasa menjadi beban terhadap APBD Jatim. Dikarenakan subsidi bunga sebesar 9,25 persen yang di tanggung oleh APBD Jatim, hal ini pernah menjadi pembahasan penting dengan BPR pada rapat evaluasi tahun 2023, saat itu program terancam tidak akan berlanjut karena beban bunga yang besar. Perwakilan BPR Jatim menyampaikan tidak sedikit pula pelaku UMKM yang menginginkan jika plafon bisa lebih dari Rp50.000.000,00. Berdasarkan hasil evauasi tersebut menyatakan banyak UMKM yang menginginkan plafon bisa dinaikkan lagi.

Pada tahun 2024 melalui keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 100.3.3.1/125/KPTS/013/2024 menetapkan plafon kredit terbesar Rp25juta dalam kurun waktu 2 Tahun. Ketidaksesuaian antara keinginan masyarakat dan pemerintah menjadi hal yang perlu dikaji ulang, untuk bisa merespon keinginan pelaku UMKM dan dapat mengoptimalkan Prokesra itu sendiri. Berdasarkan hasil wawancara dengan Deby Rositasari selaku Staff bidang Pembiayaan Diskop UKM Jatim, menyatakan bahwa dalam Implementasi Prokesra masih terdapat masalah, yaitu sebagai berikut :

“Plafon dari prokesra ini memang kecil hanya maksimal 25 juta di Tahun 2024. Dibandingkan dengan program kredit yang lain seperti KUR yang plafonnya jauh lebih tinggi. Kemudian juga terdapat UMKM yang sudah melakukan pinjaman pada pihak lain sehingga tidak dapat melakukan pinjaman Prokesra. Kemudian juga para UMKM yang meminjam Prokesra itu akan memberikan jaminan kepada BPR, namun jaminan yang diberikan tidak mengcover pinjaman, sehingga dari pihak BPR hanya dapat memberikan setengah dari dana yang ingin di pinjam. Dengan kurun waktu yang pendek pula UMKM dibebankan dengan angsuran yang cukup besar” (Hasil wawancara 13 Maret 2025)

Menurut Nur Reni (2023) Prokesra menjadi salah satu inovasi Pemprov Jatim yang dilaksanakan oleh BUMD Provinsi Jatim, karena di beberapa Provinsi lain, yang menjalankan adalah Kabupaten, sehingga Prokesra merupakan salah satu inovasi yang bermanfaat dan baik khususnya untuk pelaku usaha. Menurut Diskop UKM Jatim (2024) hingga tahun 2025 kebutuhan untuk membayar tagihan atas penyaluran realisasi kredit pada tahun 2024 yang terhitung sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar).

Dengan adanya Prokesra yang menjadi program untuk memberikan kemudahan akses UMKM untuk mengakses permodalan diperlukan analisis lebih lanjut terhadap pelaksanaan Prokesra di Kab. Sidoarjo hal ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan Prokesra di Kab. Sidoarjo. Oleh karena itu berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis melakukan penelitian yang berjudul “Implementasi Program Kredit Sejahtera (Prokesra) dalam Program Kredit Sejahtera (Prokesra) Dalam Mendorong Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Untuk Mengakses Permodalan (Studi Kasus Di Kabupaten Sidoarjo) dengan menggunakan teori implementasi program dari David C. Korten dalam Bahri et al., (2020), yang menekankan bahwa keberhasilan suatu program ditentukan oleh kesesuaian antara program dengan pemafaat program dengan organisasi pelaksana, dan pemanfaat dengan pelaksana. Dalam konteks Program Kredit Sejahtera, teori ini relevan untuk mengkaji sejauh mana Program Prokesra dirancang secara tepat, dilaksanakan oleh institusi yang kapabel, dan dimanfaatkan oleh pemafaat secara efektif. Dengan demikian, teori Korten menjadi alat analisis

yang komprehensif untuk menganalisis implementasi program secara komprehensif dan sesuai dengan kondisi lapangan.

1.2 Rumusan Masalah

Merujuk pada penjabaran latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka fokus permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian adalah “Bagaimana Implementasi Program Kredit Sejahtera (Prokesra) Dalam Mendorong Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Untuk Mengakses Permodalan, Di Kabupaten Sidoarjo?”

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan merujuk pada rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis, dan menggambarkan hasil temuan Implementasi Program Kredit Sejahtera (Prokesra) dalam Mendorong Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Untuk Mengakses Permodalan, Studi Kasus Di Kabupaten Sidoarjo.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini merupakan wujud kepedulian akademik terhadap pelaksanaan kebijakan Prokesra bagi UMKM di Jawa Timur, mengingat masih banyaknya masalah permodalan UMKM di Jatim serta permasalahan terkait dengan program tersebut. Melalui penelitian ini, diharapkan hasil yang diperoleh dapat dijadikan sebagai acuan, referensi, serta landasan teori yang relevan bagi penelitian-penelitian selanjutnya di masa depan.

1.4.2. Manfaat Praktis

Diharapkan, penelitian ini dapat memberikan manfaat praktis bagi berbagai pihak, yaitu:

1. Bagi peneliti

- a. Penelitian ini merupakan salah satu syarat akademik dalam menyelesaikan studi pada Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Budaya dan Politik, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.
- b. Dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai Implementasi pelaksanaan kebijakan program kredit sejahtera bagi Usaha Mikro dan Kecil di Jawa Timur, Selain itu, penelitian ini juga merupakan wujud penerapan teori dan pengetahuan yang diperoleh selama masa perkuliahan.

2. Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Penelitian ini memiliki manfaat sebagai pendukung dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang pendidikan, serta dapat dijadikan sebagai acuan atau bahan pembandingan bagi peneliti lain yang ingin melakukan kajian serupa di kemudian hari.

3. Bagi Diskop UKM Jatim

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan perspektif baru yang berguna sebagai bahan pertimbangan dalam upaya pengembangan serta peningkatan Prokesra, guna mendukung terwujudnya transformasi ekonomi di Jawa Timur.

4. Bagi BPR Jatim

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi BPR Jatim, khususnya dalam hal evaluasi dan penguatan implementasi Prokesra yang dapat memberikan gambaran mengenai persepsi dan kebutuhan masyarakat terhadap layanan Prokesra.